

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DESA SUKAMANTRI KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI

Santi Legianti Sutandi

e-mail : santilegianti@stisipwidyapuri-smi.ac.id
STISIP Widyapuri Mandiri

Abstract

Building a development program in the community, in its implementation it is essential to pay a lot of attention to the participants who will receive the empowerment. This is so that the receipt of information becomes balanced and equal between participants who have different ways of thinking as a result of different life experiences. This is done so that the community empowerment program implemented can be carried out properly. In this case, the research focuses on the problem of policy implementation of the Family Welfare Empowerment Program (PKK) in Sukamantri Village related to women's empowerment. In qualitative research, the problems brought by researchers are still dim, even though they are still dark, complex and dynamic. Therefore, problems in this research are still tentative and will be developing or changing after the researcher is in the field.

Keywords: qualitative, tentative, empowering family welfare.

Abstrak

Membangun sebuah program pengembangan di masyarakat, dalam penyelenggaraannya sangat penting untuk memberikan perhatian yang besar kepada partisipan yang akan menerima program pemberdayaan tersebut. Hal ini bertujuan agar penerimaan informasi menjadi seimbang dan setara antara peserta yang tentunya memiliki cara berpikir yang berbeda akibat dari pengalaman hidup yang berbeda pula. Hal ini dilakukan agar program pengembangan masyarakat yang diimplementasikan dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini, penelitian difokuskan pada masalah implementasi kebijakan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Sukamantri yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti masih bersifat samar-samar, bahkan masih tampak samar-samar, kompleks, dan senantiasa dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian ini masih bersifat tentatif dan akan berkembang atau berubah setelah peneliti terjun ke lapangan.

Kata Kunci : kualitatif, tentatif, pemberdayaan kesejahteraan keluarga

1. Pendahuluan

Menyusun sebuah program pembangunan di masyarakat, dalam implementasinya sangat penting untuk memperhatikan kepada siapa saja partisipan yang akan menerima pemberdayaan. Hal ini dimaksudkan agar penyerapan informasi berjalan secara seimbang dan sejajar antara partisipan yang memiliki cara pandang yang berbeda karena pengalaman hidup yang berbeda. Hal ini dilakukan agar program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dapat diimplementasikan dengan baik.

Partisipan dalam program pengembangan di masyarakat salah satunya adalah perempuan, karena sesungguhnya keberhasilan suatu generasi bangsa ditentukan oleh sosok perempuan. Potensi perempuan sangat besar, potensi perempuan tidak akan habis untuk direalisasikan menjadi sesuatu yang actual yang siap menjadi pertimbangan bagi setiap orang..

Wujud perhatian pemerintah dalam mengaktifkan peran serta perempuan melalui program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Penggerak PKK adalah elemen masyarakat, baik kaum laki-laki ataupun perempuan. Namun, dalam implementasinya, program ini justru tidak terlalu banyak melibatkan kaum laki-laki.

Disamping itu, perempuan memiliki peran yang besar dalam membentuk keluarga yang berkualitas dan bermartabat. Bahkan lebih dari itu, perempuan juga memiliki kontribusi.

Contoh kegiatan dari program ini adalah pelatihan keterampilan menjahit, keterampilan membuat kue, keterampilan kerajinan tangan dari material yang sering dibuang, dll..

Pemberdayaaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai bentuk organisasi pemberdayaan yang didalamnya terdapat kaum perempuan yang memiliki tujuan dan sasaran yang sama, dimana tujuan dan sasarannya yaitu mampu mewujudkan keluarga yang sejahtera. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan belum dilaksanakan dengan maksimal.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Berfikir

Didalam riset ini, penulis menggunakan teori dari Van Metter dan Van Hord. Menurut Van Metter dan Van Horn, implementasi kebijakan adalah tindakan yang ditempuh oleh pihak pemerintah ataupun swasta, secara individu maupun kelompok, yang dimaksud untuk mencapai tujuan.

Teori ini mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Teori ini juga mengungkapkan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu : ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan.

Adapun masalah yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan ini adalah:

1. Sebagian dari masyarakat masih kurang memahami program PKK. Sehingga hanya sebagian orang yang mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh kader-kader PKK, Pasalnya, masyarakat, dalam kasus ini khususnya kaum perempuan, kurang memahami tujuan diadakannya program PKK.
2. Kurangnya sumber daya manusia berkualitas dan berkesinambungan dalam upaya pemberdayaan perempuan sehingga tanggapan masyarakat masih minim dalam berpartisipasi dalam program PKK.
3. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor yang kurang sungguh-sungguh terhadap suatu kebijakan mengakibatkan masyarakat tidak peduli dengan program pemerintah.

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, metode yang akan digunakan dalam riset adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2014: 205): "Dalam penelitian kualitatif masalah yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap kompleks dan dinamis." Masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat tentatif, sementara dan dapat berkembang serta mengalami perubahan setelah periset terjun ke lapangan, maka pertanyaan riset yang muncul sebagai berikut

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Sukamantri dilaksanakan?

- 2) Apakah faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Sukamantri?
- 3) Usaha-usaha apasaja yang dilaksanakan untuk menangani permasalahan dalam implementasi program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Sukamantri?

Tujuan penelitian tentang Implementasi Kebijakan program Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (PKK) adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Sukamantri diterapkan.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan.
- 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Sukamantri.

3. Objek dan Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk riset ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Secara umum riset ini berusaha menggambarkan suatu kondisi atau keadaan objek yang dikaji secara aktual sebagaimana adanya.

Penelitian kualitatif memiliki tujuan utama, yaitu memaparkan dan mengungkapkan serta menggambarkan dan menjelaskan. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dikarenakan penelitian tersebut menyediakan deskripsi mengenai situasi yang complex dan petunjuk bagi penelitinya di masa yang akan datang.

Indikator Penelitian

Dalam riset ini periset akan mengkaji implementasi kebijakan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), maka yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah :

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan, yang meliputi :
 - a. Ideal di level warga;
 - b. Kejelasan tujuan.
- 2) Sumberdaya, yang meliputi :
 - a. Sumberdaya Manusia;
 - b. Sumberdaya Biaya;
 - c. Sumberdaya Waktu.
- 3) Sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, yang meliputi :
 - a. Respon masyarakat;
 - b. Pemahaman masyarakat.

Unit Analisis dan Setting Informan

Selanjutnya, unit analisis dalam penelitian tersebut meliputi:

- 1) Kepala desa;
- 2) Ketua PKK.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti langsung mendatangi ke lapangan untuk memperoleh informan yang relevan.

Human instrumen adalah instrument utama dalam penelitian, dalam penelitian menggunakan alat bantu diantaranya:

- 1) Buku catatan
- 2) *Voice Recorder*
- 3) *Camera*

Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, untuk mengetahui fakta, peristiwa, situasi, keadaan, konteks, ruang, dan penelitian yang mencakup wawancara mendalam dan dokumentasi untuk ditransformasi kedalam Analisis Data.

4. Hasil Dan Pembahasan

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yang peneliti lakukan diantaranya tahapan awal, tahapan penelitian lapangan dan tahapan akhir penelitian.

Tahapan Awal

Tahapan ini dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan survei dengan mencari subjek yang akan dijadikan sebagai informan. Berdasarkan cara perolehan data, data dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari narasumber yang sifatnya lebih subyektif sebab dihasilkan dari pandangan pribadi melalui wawancara dan observasi.
2. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini digunakan peneliti selaku panduan riset karena informasi diperoleh dari berbagai dokumen dan bahan informasi yang berhubungan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilaksanakan ketika pengumpulan data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung maupun setelah selesai pengambilan data dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan dalam analisis data, yakni *reduction data*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Dari hasil penelitian di lapangan, peneliti memperoleh data berupa jawaban atas wawancara yang diajukan kepada Bapak Cecep Andi Rusmawan, S.IP selaku Kepala Desa, kepada Ibu Rantie PM, S.IP selaku Ketua PKK, Kepada Ibu Eli selaku Sekretaris PKK dan kepada Ibu Rinarti selaku Ketua Pokja II. Dan data lainnya berupa profil Desa Sukamantri dan Struktur organisasi penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Hasil pengumpulan data yang didapatkan tergolong cukup yang sehingga membuat peneliti melakukan analisis data melalui reduksi data. Peneliti mereduksi kembali data-data hasil wawancara, dokumentasi pada saat peneliti sedang berada di lapangan dan data-data sekunder lainnya supaya peneliti dapat menetapkan data-data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Berdasarkan hasil reduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dari penelitian ini bersifat narrative namun dilandasi oleh teori-teori berkaitan dengan topik penelitian.

3) *Conclusion Drawing/Verification*

(Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi)

Penarikan kesimpulan merupakan langkah penyelesaian dalam proses analisis data. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dicurahkan melalui deskriptif sesuai dengan hasil penelitian selama di lapangan, yaitu menggambarkan data sesuai dengan pedoman wawancara, guna mendukung argumen dari narasumber.

Penelitian tentang implementasi kebijakan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dilakukan mendeskripsikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Mendeskripsikan implementasi kebijakan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Sukamantri dilaksanakan?
- 2) Mendeskripsikan penghambat implementasi kebijakan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Sukamantri?
- 3) Menjelaskan hal-hal penting yang ditangani mengenai permasalahan dalam implementasi program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Sukamantri?

Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Implementasi kebijakan berkaitan erat pula oleh berbagai interest yang memperngaruhinya, dengan demikian sebuah kebijakan pada implementasinya akan menyangkut sekian banyak interests dan sejauh mana interest tersebut mempunyai pengaruh dalam implementasi tersebut.

Dalam pelaksanaannya setiap pembentukan suatu peraturan pasti terdapat kepentingan di dalamnya dan mempunyai landasan mengapa aturan atau kebijakan tersebut harus dibuat dan ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber yaitu Bapak Cecep Andi Rusmawan S.IP Kepala Desa Sukamantri, beliau mengatakan bahwa:

“ Ketika suatu peraturan dibuat, maka harus mempunyai landasan atau alasan mengapa peraturan itu harus ada dan harus dibuat, seperti halnya peraturan tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Yang melatarbelakangi diberlakukannya peraturan tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yaitu adanya peraturan yang mengatur tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) itu sendiri, karena PKK adalah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak, penggerak disini maksud nya dalam membangun, membina dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga. Karena keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat.

Kemudian Ibu Rantie PM S.IP selaku Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), beliau mengatakan bahwa” Yang melatar belakangi diberlakukannya kebijakan tentang PKK ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Pasalnya, peraturan menteri ini membahas tentang pemberdayaan masyarakat, terutama keluarga. Karena target utama dari program tersebut adalah keluarga selaku kesatuan terkecil dari masyarakat.

Mengenai hal yang sama juga disampaikan narasumber kedua, Ibu Teti, beliau mengatakan bahwa:

“Yang melatar belakanginya adalah karena pembangunan nasional itu agar berjalan dan berhasil efektif maka sasaran utamanya adalah keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat.”

Bedasarkan penjelasan dari ketiga narasumber di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan program PKK sudah diterapkan dengan baik di Desa Sukamantri, Terlihat dari keterangan narasumber yang menyatakan pendapatnya bahwa implementasi kebijakan di Desa Sukamantri di terapkan dengan beberapa hal seperti diadakan pengajian, pendidikan dan keterampilan memanfaatkan benda-benda bekas yang sudah tidak digunakan lagi seperti cangkang kopi dan lainnya.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan merupakan penentu tercapainya keberhasilan pencapaian sasaran pelaksanaan program PKK. Selain itu, kinerja implementasi kebijakan bisa terukur jika ukuran mengenai sebuah kebijakan realistis terhadap kondisi sosial budaya masyarakat yang berada di wilayah pelaksana kebijakan.

Melalui pemaparan dari beberapa narasumber di lapangan, peneliti menyimpulkan hasil penelitian ini bahwa implementasi kebijakan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ini memiliki tujuan yang baik yaitu untuk mensejahterakan keluarga.

Namun pada kenyataannya di lapangan sebagian dari masyarakat belum mengetahui tujuan dari diadakannya program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ini. Hal ini dapat dilihat dari jawaban dari informan yang menjawab tidak mengetahui tujuan dari adanya program PKK ini. Padahal di dalam program PKK ini terdapat program dan kegiatan di bidang keterampilan yang memiliki manfaat unyuk mensejahterakan keluarganya khususnya keterampilan yang dilakukan oleh perempuan sehingga dalam hal ini perempuan tidak selalu mengandalkan pendapatan suaminya.

Sumberdaya

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga pasal 18 menjelaskan bahwa pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan PKK terbilang sangat banyak mulai dari untuk merapihkan buku-buku administrasi, pengadaan pengajian rutin, pelatihan keterampilan yang dilakukan setiap bulannya serta dalam hal kesehatan dimana Desa Sukamantri ini pernah mengikuti perlombaan dibidang kesra juara 1 di tingkat kecamatan, juara 1 di tingkat Kabupaten tingkat kelembagaan PKK, dan terakhir juara 3 kesra PKK tingkat provinsi. Pernyataan tersebut senada diungkapkan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Teti selaku ketua kelompok kerja IV.

Selain itu program realisasi dari program PKK ini ada di bidang pendidikan dan keterampilan dimana pada bidang ini masyarakat khususnya perempuan diberdayakan melalui keterampilan yang sebelumnya telah diajarkan oleh para kader PKK dan dalam bidang pendidikan di Desa Sukamantri itu sendiri terdapat PAUD yang didirikan untuk mendidik anak-anak di usia dini.

Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana

Berdasarkan pendapat informan di atas dapat di simpulkan bahwa para pelaksana yaitu kader PKK dalam hal ini sudah memiliki pemahaman mengenai program PKK hal ini dapat dilihat dari pendapat para informan yang berpendapat bahwa para pelaksana sudah melaksanakan tugasnya dengan baik walaupun respon ada sebagian dari masyarakat yang merespon program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tersebut dengan baik dan ada pula sebagian masyarakat yang tidak merespon program PKK tersebut.

Mendeskripsikan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Dalam implementasi kebijakan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Sukamantri mengalami kendala di antaranya :

1. Sumberdaya manusia

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Rantie PM S.IP selaku ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), beliau mengatakan bahwa factor penghambat dalam implementasi kebijakan PKK yaitu:

“Sumberdaya manusia nya yaitu dari masyarakat nya itu sendiri karena masyarakat nya belum paham tentang PKK. Pemahaman masyarakat dalam hal ini masih minim yang mengakibatkan tingkat partisipasi untuk memberdayaka perempuan itu rendah.”

2. Terbatasnya anggaran yang diberikan bagi program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Fenomena yang terjadi menyangkut masalah kebijakan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) masih menimbulkan beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah terbatasnya jumlah anggaran yang diberikan. Hal ini di ungkapkan oleh Ibu Teti, beliau mengatakan bahwa: “...terkadang dana, untuk pelatihan kader-kader karena terkadang kita melatih lagi kader.... dan terkadang kader untuk terjun langsung ke lapangan memerlukan dana. kadang kita juga perlu untuk mengajak masyarakat mengundang ke desa keseluruhan kan gak mungkin terlalu banyak jadi biasanya melalui posyandu-posyandu.”

Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi permasalahan dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Melalui penelitian di lapangan, kami menemukan bahwa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) antara lain:

1. Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat.
2. Mengadakan pembinaan
3. Mengadakan koordinasi dengan Desa untuk mengangani masalah anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Desa.
4. Mengadakan pendekatan kepada tokoh masyarakat.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan tentang implementasi kebijakan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang dibentuknya peraturan tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yaitu untuk membina dan mengembangkan kemampuan membangun, menumbuhkan, dan membentuk keluarga dalam rangka mencapai kesejahteraan keluarga selaku sebuah unit masyarakat paling kecil. Implementasi Kebijakan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ini sudah diterapkan dengan baik di Desa Sukamantri namun implementasi program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Program pengembangan ini masih kurang optimal sesuai dengan yang diinginkan karena adanya keterbatasan dalam proses implementasi.
2. Tujuan Implementasi kebijakan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah untuk menyejahterakan keluarga. Akan tetapi, pada realitanya, beberapa orang tidak memahami tujuan diadakannya program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
3. Implementasi kebijakan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi mengalami beberapa kendala di antaranya:
 - a. Pemahaman masyarakat mengenai Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) masih minim sehingga tingkat partisipasi untuk memberdayakan perempuan sangat rendah.
 - b. Terbatasnya anggaran yang diberikan bagi program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
 - c. Upaya Mengatasi Tantangan dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - d. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) antara lain, Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat.

- e. Mengadakan pembinaan & Mengadakan koordinasi dengan Desa untuk mengangani masalah anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Desa serta Mengadakan pendekatan kepada tokoh masyarakat.

Dengan demikian, peneliti memberikan saran antara lain:

1. Ketika sebuah kebijakan telah disepakati dan dalam proses pengimplementasiannya sebaiknya kebijakan tersebut di sosialisasikan, Pasalnya, efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
2. Kepada pemerintah Desa agar dapat memberikan perhatian kepada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada kegiatan apapun dilakukan oleh setiap pengurus sehingga kesejahteraan di lingkungan masyarakat dapat terwujud. khususnya untuk mensejahterakan keluarga dapat sesuai dengan yang diharapkan.
3. Para kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) harus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kegiatan PKK untuk mensejahterakan keluarga khususnya kepada perempuan sehingga masyarakat dalam hal ini perempuan mampu berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan program-program yang dilaksanakan oleh kader PKK.

Daftar Pustaka

- Fitriana. (2018). *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. Aceh : Syiah Kuala University Press
- Indrawijaya, A.I. (2018). *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Putra, Zulfikar, Wiridin, Dermawan, Dkk (2022). *Implementasi Upah Minimum terhadap Kesejahteraan Pekerja*. Malang: Ahlimedia
- Saeffudin, Asep, Dkk (2017). *Balanced Score Card Strategi, Implementasi, dan Studi Kasus*. Bogor : IPB Press
- Sari, Ade Risna (2021). *Implementasi Kebijakan Kurikulum -13*. Pekalongan : Nasya Expanding Management (NEM)
- Setianto, Benny D. (2021). *HAM: Kebhinnekaan, Inklusivitas dan Ketangguhan Masyarakat*. Semarang:Universitas Katolik Soegijpranata
- Sondang, Siagian P.(2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi ke-15. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steven R. Steiber, PhD. (2017). *Measuring and Managing Patient Satisfaction*. USA, America Hospital Publishing Inc,

Studi Kasus Pada Bumn Pt. Jamsostek (Persero)

Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sujono (2019). *Manajemen Kinerja*. Bandung Albabeta Edisi Revisi.

Susetyo, Budi. (2017). *Prosedur Penyusunan dan Analisis Tes untuk Penilaian Hasil Belajar Bidang Kognitif*. Bandung: Refika Aditama.

Wahab, Abdul Aziz. Ali, Muhammad (2017). *Ilmu & Aplikasi Pendidikan*. Bandung : Imperial Bhakti Utama